

Pergeseran Otoritas Tafsir Al-Qur'an: Analisis Epistemologi Penafsiran di Era Digital

Abdullah Munir¹, Hurin'in AM²

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan

Email: abdullahmunir@stitmakrifatulilmi.ac.id, iin@stitmakrifatulilmi.ac.id

Keywords: Qur'anic Interpretation; Epistemology; Generative AI; Digital Religion; Religious Authority.

Kata Kunci: Otoritas Tafsir; Epistemologi; Generative AI; Tafsir Digital; Al-Qur'an.

Abstract:

The rapid advancement of digital technology, particularly Generative Artificial Intelligence (AI), has significantly transformed how Muslims access, understand, and interpret the Qur'an. Traditionally, the authority of Qur'anic interpretation resided in qualified exegetes possessing expertise in Arabic linguistics, Qur'anic sciences, legal theory, and established interpretive methodologies. Today, however, AI-powered digital platforms provide instant explanations of Qur'anic verses, raising critical epistemological questions regarding interpretive authority, methodological validity, and the position of AI in Islamic knowledge production. This study aims to examine the shift in Qur'anic interpretive authority in the digital era and analyze the epistemological implications of Generative AI in contemporary Qur'anic interpretation. Employing a qualitative library research approach, the study draws upon classical Qur'anic exegesis, Islamic epistemology, digital religion studies, and recent scholarship on Artificial Intelligence in Islamic studies. Data were analyzed using content analysis and epistemological analysis. The findings indicate that Generative AI does not replace the role of qualified exegetes but functions as a knowledge mediator that reshapes the distribution, accessibility, and production of religious knowledge. The observed shift represents not a complete transfer of authority from humans to machines but rather a transformation from individual-centered authority toward digitally mediated knowledge ecosystems. Consequently, this study proposes the reconstruction of Qur'anic interpretive epistemology that positions AI as an assistive analytical tool while maintaining interpretive validity through the principles of Qur'anic sciences, scholarly competence, methodological rigor, source transparency, and academic verification.

Abstrak:

Perkembangan teknologi digital, khususnya kehadiran Generative Artificial Intelligence (Generative AI), telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat mengakses, memahami, dan menafsirkan Al-Qur'an. Jika pada masa sebelumnya otoritas penafsiran berada pada mufasir yang memiliki kompetensi dalam bahasa Arab,

ulumul Al-Qur'an, usul fikih, serta metodologi tafsir, kini masyarakat memperoleh penjelasan ayat secara instan melalui berbagai platform digital berbasis kecerdasan buatan. Fenomena ini menimbulkan persoalan epistemologis mengenai pergeseran otoritas tafsir, validitas penafsiran, serta posisi AI dalam konstruksi pengetahuan keislaman. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pergeseran otoritas tafsir Al-Qur'an di era digital serta menjelaskan implikasi epistemologis penggunaan Generative AI terhadap proses penafsiran. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh dari literatur klasik ilmu tafsir, teori epistemologi Islam, kajian digital religion, serta penelitian mutakhir mengenai Artificial Intelligence dalam studi Islam. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis) dan analisis epistemologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Generative AI tidak menggantikan posisi mufasir sebagai otoritas ilmiah, tetapi berperan sebagai mediator pengetahuan yang mengubah pola distribusi, aksesibilitas, dan produksi informasi keagamaan. Pergeseran otoritas yang terjadi bukan merupakan perpindahan penuh dari manusia kepada mesin, melainkan transformasi dari otoritas berbasis individu menuju otoritas berbasis ekosistem digital. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi epistemologi tafsir yang menempatkan AI sebagai instrumen pendukung, sementara validitas penafsiran tetap bergantung pada metodologi ulumul Al-Qur'an, kompetensi ilmiah mufasir, transparansi sumber, serta proses verifikasi akademik.

A. introduction

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat memperoleh pengetahuan, termasuk pengetahuan keagamaan. Jika sebelumnya akses terhadap literatur Islam bergantung pada perpustakaan, pesantren, atau majelis taklim, kini berbagai sumber keislaman dapat diperoleh hanya melalui telepon pintar yang terhubung dengan internet. Perubahan tersebut semakin terasa sejak hadirnya *Generative Artificial Intelligence (Generative AI)*, seperti ChatGPT, Gemini, Claude, dan Copilot, yang mampu memberikan penjelasan terhadap berbagai persoalan keagamaan secara cepat dan interaktif. Teknologi ini tidak hanya mempermudah pencarian informasi, tetapi juga mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan sumber-sumber pengetahuan Islam (Fui-Hoon Nah et al., 2023).

Dalam konteks studi Al-Qur'an, perubahan tersebut memunculkan fenomena yang menarik. Masyarakat yang sebelumnya cenderung merujuk kepada ulama, guru, atau kitab-kitab tafsir ketika ingin memahami makna suatu ayat, kini semakin sering mengajukan pertanyaan kepada sistem berbasis *Artificial Intelligence*. Jawaban yang dihasilkan AI umumnya disajikan dalam bentuk narasi yang runtut, mudah dipahami, bahkan sering kali dilengkapi dengan kutipan ayat dan pendapat para ulama. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi digital tidak lagi sekadar menjadi media penyebaran informasi, tetapi mulai berperan sebagai perantara (*mediator*) dalam proses memperoleh pengetahuan keagamaan.

Di satu sisi, perkembangan tersebut memberikan peluang yang besar bagi perluasan akses terhadap khazanah tafsir. Berbagai karya tafsir klasik maupun kontemporer yang sebelumnya sulit dijangkau kini dapat diakses oleh masyarakat luas dalam waktu singkat. Situasi ini berkontribusi terhadap demokratisasi pengetahuan keagamaan karena setiap orang memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mempelajari Al-Qur'an. Namun, di sisi lain, kemudahan tersebut juga menimbulkan persoalan baru mengenai otoritas penafsiran. Ketika masyarakat mulai menjadikan *Artificial Intelligence* sebagai rujukan utama, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana jawaban AI dapat dipandang sebagai representasi dari penafsiran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam tradisi keilmuan Islam, penafsiran Al-Qur'an bukan sekadar aktivitas menjelaskan makna ayat. Seorang mufasir dituntut memiliki kompetensi dalam berbagai disiplin ilmu, seperti bahasa Arab, ulumul Al-Qur'an, ilmu hadis, usul fikih, serta memahami konteks historis dan sosial turunnya ayat. Karena itu, otoritas tafsir dibangun melalui proses intelektual yang panjang dan memperoleh legitimasi dari komunitas keilmuan, bukan hanya karena kemampuan menyampaikan informasi. Validitas suatu tafsir sangat ditentukan oleh metodologi yang digunakan, sehingga proses penafsiran selalu berkaitan dengan tanggung jawab ilmiah dan etika akademik (As-Suyuthi, n.d.).

Berbeda dengan seorang mufasir, Generative AI bekerja melalui mekanisme komputasional berbasis *Large Language Models* (LLMs) (Bender et al., 2021). Sistem ini menghasilkan jawaban dengan mengenali pola statistik dari data pelatihan yang

sangat besar, kemudian menyusun respons berdasarkan probabilitas kemunculan kata dan kalimat. Meskipun mampu merangkum berbagai referensi dan menghasilkan uraian yang tampak logis, AI tidak memiliki kemampuan melakukan ijtihad, mengevaluasi kekuatan dalil, maupun mempertimbangkan dimensi normatif sebagaimana dilakukan oleh seorang mufasir. Oleh karena itu, jawaban AI pada dasarnya merupakan hasil sintesis informasi, bukan produk penafsiran dalam pengertian epistemologis ilmu tafsir.

Perkembangan tersebut menghadirkan persoalan epistemologis yang penting untuk dikaji. Persoalan utamanya bukan terletak pada boleh atau tidaknya memanfaatkan *Artificial Intelligence* sebagai alat bantu dalam memahami Al-Qur'an, melainkan pada perubahan struktur otoritas pengetahuan yang terjadi di ruang digital. Ketika masyarakat lebih mempercayai jawaban yang muncul secara instan dibandingkan proses penafsiran yang dibangun melalui metodologi ilmiah, batas antara kemudahan akses informasi dan otoritas keilmuan menjadi semakin kabur. Pada saat yang sama, algoritma digital juga berpotensi membentuk preferensi pengguna terhadap penafsiran tertentu melalui mekanisme personalisasi konten, sehingga otoritas keagamaan tidak lagi hanya ditentukan oleh kompetensi ilmiah, tetapi juga oleh logika teknologi digital (A. Campbell, 2013).

Sejumlah penelitian telah membahas pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam pendidikan Islam, pembelajaran Al-Qur'an, maupun transformasi praktik keagamaan di era digital. Akan tetapi, sebagian besar penelitian tersebut masih menempatkan AI sebagai instrumen pembelajaran atau media penyebaran informasi. Kajian yang secara khusus membahas bagaimana *Generative Artificial Intelligence* memengaruhi struktur epistemologi tafsir dan menggeser mekanisme otoritas penafsiran Al-Qur'an masih relatif terbatas. Padahal, persoalan tersebut menjadi semakin penting seiring meningkatnya penggunaan AI sebagai sumber informasi keagamaan oleh masyarakat Muslim.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran otoritas tafsir Al-Qur'an pada era *Generative Artificial Intelligence* dengan meninjau implikasinya dari perspektif epistemologi tafsir. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

konseptual bagi pengembangan studi tafsir kontemporer sekaligus memperkaya diskursus mengenai relasi antara kecerdasan buatan, otoritas keagamaan, dan transformasi pengetahuan Islam di era digital.

LANDASAN TEORI

1. Epistemologi Tafsir dan Otoritas Penafsiran Al-Qur'an

Dalam tradisi keilmuan Islam, penafsiran Al-Qur'an tidak dipahami sebagai aktivitas menjelaskan makna ayat secara bebas, tetapi sebagai proses ilmiah yang dibangun di atas seperangkat metodologi yang telah berkembang sejak masa klasik. Validitas suatu tafsir bergantung pada cara penafsir memperoleh pengetahuan (*episteme*), menggunakan perangkat metodologis, serta mempertanggungjawabkan kesimpulan yang dihasilkan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai otoritas tafsir pada hakikatnya merupakan pembahasan mengenai epistemologi pengetahuan dalam Islam.

Konsep epistemologi (*nazariyyat al-ma'rifah*) dalam tradisi Islam menjelaskan bahwa pengetahuan yang sah tidak hanya ditentukan oleh hasil akhirnya, tetapi juga oleh proses yang melahirkannya. Dalam konteks tafsir, proses tersebut melibatkan penguasaan bahasa Arab, ilmu qirā'āt, asbāb al-nuzūl, munāsabah al-āyāt, nasikh wa al-mansūkh, ilmu hadis, usul fikih, serta kaidah-kaidah istinbāt. Keseluruhan perangkat tersebut membentuk mekanisme ilmiah yang memungkinkan seorang mufasir menghasilkan penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan (As-Suyuthi, n.d.).

Karena itu, otoritas tafsir dalam Islam tidak lahir dari popularitas ataupun kemampuan menyampaikan informasi, tetapi dibangun melalui kompetensi akademik dan pengakuan komunitas keilmuan. Menurut Abdullah Saeed (2006), perkembangan tafsir selalu mengalami dialog dengan perubahan sosial, namun perubahan tersebut tidak menghilangkan pentingnya metodologi sebagai landasan utama dalam memahami Al-Qur'an. Penafsiran dapat berkembang mengikuti konteks zaman, tetapi validitasnya tetap harus berpijak pada prinsip-prinsip ilmiah yang telah dibangun dalam tradisi tafsir.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa epistemologi tafsir bersifat dinamis. Perubahan media penyebaran pengetahuan, termasuk teknologi digital,

tidak serta-merta mengubah sumber otoritas penafsiran. Yang berubah adalah cara masyarakat mengakses dan memanfaatkan pengetahuan tersebut. Oleh sebab itu, ketika *Artificial Intelligence* mulai digunakan sebagai sumber informasi keagamaan, persoalan yang muncul bukan hanya mengenai akurasi informasi, melainkan juga mengenai bagaimana otoritas penafsiran dipertahankan di tengah perubahan ekosistem pengetahuan.

2. Transformasi Otoritas Keagamaan dalam Ruang Digital

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat membangun kepercayaan terhadap sumber pengetahuan agama. Jika sebelumnya otoritas keagamaan didominasi oleh ulama, lembaga pendidikan, dan karya-karya ilmiah, kini ruang digital menghadirkan mekanisme baru yang memungkinkan otoritas dibentuk melalui interaksi antara pengguna, platform digital, dan algoritma.

Campbell (2013) menjelaskan bahwa agama di era digital tidak hanya berpindah ke media daring, tetapi mengalami proses negosiasi ulang terhadap bentuk otoritasnya. Teknologi digital menciptakan ruang sosial baru (*digital religion*) yang memungkinkan praktik keberagamaan berlangsung secara lebih terbuka, partisipatif, dan terdesentralisasi. Dalam ruang tersebut, legitimasi keagamaan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada institusi formal, tetapi juga dipengaruhi oleh jaringan digital yang mempertemukan ulama, akademisi, kreator konten, dan masyarakat.

Senada dengan itu, McClure (2019) menunjukkan bahwa internet telah mengubah pola produksi dan distribusi pengetahuan Islam. Berbagai platform digital memungkinkan masyarakat memperoleh informasi keagamaan tanpa melalui jalur pendidikan formal. Akibatnya, mekanisme pembentukan otoritas menjadi semakin kompleks karena dipengaruhi oleh visibilitas digital, jumlah pengikut, intensitas interaksi, dan rekomendasi algoritma.

Dalam perspektif sosiologi pengetahuan, perubahan tersebut menunjukkan bahwa otoritas keagamaan kini bersifat lebih tersebar (*distributed authority*). Masyarakat tidak lagi bergantung pada satu sumber pengetahuan, melainkan memilih berbagai sumber yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Konsep ini menjadi penting dalam penelitian karena menjelaskan bahwa pergeseran

otoritas tafsir bukan semata-mata disebabkan oleh hadirnya *Artificial Intelligence*, melainkan merupakan bagian dari transformasi yang lebih luas dalam ekosistem digital.

3. *Generative Artificial Intelligence* sebagai *Epistemic Tool*

Kemunculan *Generative Artificial Intelligence* menandai fase baru dalam perkembangan teknologi informasi. Berbeda dengan mesin pencari konvensional yang hanya menampilkan daftar dokumen, Generative AI mampu menghasilkan teks yang menyerupai cara manusia menyampaikan argumentasi. Teknologi ini dikembangkan melalui *Large Language Models* (LLMs) yang mempelajari hubungan statistik antarkata dari miliaran data sehingga mampu menghasilkan respons yang kontekstual. (Thapa et al., 2025)

Kemampuan tersebut menjadikan AI semakin banyak dimanfaatkan dalam dunia pendidikan, penelitian, hingga kajian keagamaan. Generative AI memiliki potensi besar untuk mendukung proses pembelajaran melalui penyediaan informasi yang cepat, personal, dan adaptif. Namun, kemampuan menghasilkan teks tidak identik dengan kemampuan memahami makna sebagaimana manusia.

Floridi & Chiriatti (2020) menegaskan bahwa AI bekerja melalui pemrosesan data dan pengenalan pola, bukan melalui kesadaran, penalaran normatif, ataupun pertimbangan etis. Oleh karena itu, AI lebih tepat dipahami sebagai *epistemic tool*, yaitu instrumen yang membantu manusia memperoleh dan mengelola informasi, bukan sebagai subjek yang memiliki otoritas pengetahuan.

Konsep *epistemic tool* menjadi landasan penting dalam penelitian ini karena menjelaskan posisi AI dalam studi tafsir. AI dapat mempercepat eksplorasi literatur, membandingkan berbagai pandangan mufasir, serta membantu sintesis informasi. Akan tetapi, keputusan mengenai validitas suatu penafsiran tetap berada pada manusia yang memiliki kompetensi metodologis dalam ilmu tafsir.

Selanjutnya, perkembangan AI dalam berbagai bidang telah melahirkan paradigma *Human-Centered AI*, yaitu pendekatan yang menempatkan manusia sebagai pusat pengambilan keputusan dalam pemanfaatan teknologi. Pendekatan ini berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya penggunaan AI dalam aktivitas yang memerlukan pertimbangan moral, sosial, dan akademik.

Artificial Intelligence seharusnya dipandang sebagai teknologi yang memperluas kapasitas intelektual manusia (*augmentation*), bukan menggantikannya (*replacement*). Prinsip yang sama juga ditegaskan dalam UNESCO *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence* (2021), yang menekankan bahwa seluruh sistem AI harus dirancang untuk mendukung nilai-nilai kemanusiaan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

Dalam konteks penafsiran Al-Qur'an, pendekatan *Human-Centered AI* memberikan kerangka konseptual bahwa teknologi harus ditempatkan sebagai instrumen pendukung proses ilmiah, bukan sebagai pengganti otoritas mufasir. Dengan demikian, hasil yang dihasilkan AI tetap memerlukan proses verifikasi melalui metodologi ulumul Al-Qur'an, kritik sumber, dan dialog dengan literatur tafsir klasik maupun kontemporer.

Kerangka *Human-Centered AI* inilah yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini untuk menjelaskan bahwa pergeseran otoritas tafsir pada era *Generative Artificial Intelligence* bukan merupakan perpindahan otoritas dari manusia kepada mesin, melainkan transformasi cara pengetahuan diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan dalam ekosistem digital.

B. Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk menguji hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan untuk memahami secara mendalam perubahan otoritas tafsir Al-Qur'an pada era *Generative AI* melalui analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa artikel ilmiah bereputasi yang membahas epistemologi tafsir, otoritas keagamaan, digital religion, etika *Artificial Intelligence*, serta perkembangan *Large Language Models* (LLMs) dalam studi keislaman. Artikel diperoleh melalui pangkalan data ilmiah, seperti Scopus, Web of Science, Dimensions, Crossref, dan Google Scholar. Literatur diprioritaskan pada publikasi lima tahun terakhir (2020–2025) agar mampu menggambarkan perkembangan mutakhir mengenai *Generative AI*. Sementara itu, data sekunder berasal dari kitab-kitab klasik ilmu tafsir, buku

akademik, dokumen organisasi internasional, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian. Literatur klasik digunakan untuk menjelaskan prinsip-prinsip epistemologi tafsir, sedangkan literatur kontemporer digunakan untuk menganalisis transformasi otoritas keagamaan pada era digital.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri publikasi menggunakan kata kunci *Qur'anic interpretation, religious authority, digital religion, Generative Artificial Intelligence, Large Language Models*, dan *Islamic epistemology*. Literatur kemudian diseleksi berdasarkan tiga kriteria, yaitu relevansi dengan fokus penelitian, kredibilitas sumber, dan kebaruan publikasi. Proses seleksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa analisis dibangun di atas referensi yang memiliki kualitas akademik serta sesuai dengan perkembangan penelitian terkini.

Analisis data menggunakan *qualitative content analysis* sebagaimana dikembangkan oleh Schreier (2012), yang dipadukan dengan analisis epistemologis dan sintesis konseptual. Tahapan analisis meliputi: (1) identifikasi konsep-konsep utama yang berkaitan dengan epistemologi tafsir, otoritas keagamaan, dan Generative AI; (2) pengelompokan data ke dalam tema-tema yang memiliki keterkaitan konseptual; (3) interpretasi kritis terhadap hubungan antar tema berdasarkan perspektif epistemologi Islam dan teori *digital religion*; serta (4) penyusunan sintesis konseptual untuk menjelaskan perubahan struktur otoritas tafsir pada era *Artificial Intelligence*. Pendekatan ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menghasilkan konstruksi argumentatif mengenai posisi AI dalam ekosistem pengetahuan Islam.

Untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber melalui perbandingan antara literatur klasik ilmu tafsir, penelitian kontemporer mengenai studi Al-Qur'an, serta publikasi mutakhir tentang *Artificial Intelligence* dan *digital religion*. Selain itu, setiap argumentasi dibangun melalui dialog kritis antarberbagai perspektif sehingga interpretasi yang dihasilkan tidak bergantung pada satu sumber atau satu pendekatan tertentu. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki validitas konseptual yang memadai sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian tafsir pada era transformasi digital.

C. Result(s)

1. Pergeseran Otoritas Tafsir Al-Qur'an dalam Ekosistem Digital

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara mendasar mekanisme produksi, distribusi, dan konsumsi pengetahuan keagamaan. Dalam konteks studi Al-Qur'an, transformasi tersebut tidak hanya ditandai oleh digitalisasi kitab-kitab tafsir, tetapi juga oleh perubahan cara masyarakat memperoleh legitimasi terhadap suatu penafsiran. Jika pada masa sebelumnya pemahaman terhadap Al-Qur'an umumnya diperoleh melalui interaksi langsung dengan ulama, lembaga pendidikan Islam, atau karya-karya tafsir yang memiliki otoritas akademik, kini masyarakat semakin terbiasa memperoleh penjelasan keagamaan melalui platform digital yang menyediakan informasi secara cepat, mudah, dan interaktif. Perubahan ini menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi arena baru dalam pembentukan dan penyebaran otoritas keagamaan.

Dalam perspektif epistemologi tafsir, perubahan media penyampaian informasi tidak secara otomatis mengubah sumber otoritas penafsiran. Tradisi tafsir Islam sejak masa klasik telah menempatkan metodologi sebagai fondasi utama dalam menentukan validitas suatu penafsiran. Seorang mufasir dituntut menguasai berbagai disiplin ilmu, antara lain bahasa Arab, ulumul Al-Qur'an, ilmu hadis, usul fikih, asbāb al-nuzūl, munāsabah al-āyāt, serta kaidah-kaidah istinbāt. Kompetensi tersebut merupakan prasyarat agar proses penafsiran tidak hanya menghasilkan informasi, tetapi juga mampu mempertanggungjawabkan argumentasi yang dibangun berdasarkan kaidah ilmiah (As-Suyuthi, n.d.). Dengan demikian, otoritas tafsir pada hakikatnya merupakan otoritas metodologis, bukan sekadar otoritas informatif.

Namun demikian, ekosistem digital telah memperluas akses masyarakat terhadap berbagai sumber tafsir tanpa melalui mekanisme otoritas yang selama ini berkembang dalam tradisi keilmuan Islam. Digitalisasi kitab-kitab tafsir, meningkatnya platform dakwah daring, serta hadirnya media sosial memungkinkan masyarakat memperoleh beragam pandangan penafsiran secara instan. Kondisi tersebut membawa dampak positif berupa demokratisasi akses terhadap literatur Islam. Pengetahuan yang sebelumnya hanya dapat diakses di perpustakaan atau

lembaga pendidikan kini tersedia secara luas melalui berbagai platform digital. Akan tetapi, kemudahan tersebut juga melahirkan persoalan baru, yaitu semakin kaburnya batas antara otoritas ilmiah dan popularitas digital. Dalam banyak kasus, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu penjelasan keagamaan lebih dipengaruhi oleh kemudahan akses, tampilan visual, atau intensitas penyebaran di media digital daripada kredibilitas metodologis sumber yang digunakan (Faria et al., 2026).

Fenomena tersebut sejalan dengan konsep digital religion yang dikemukakan Campbell (2013), yaitu bahwa ruang digital bukan sekadar media penyebaran agama, tetapi menjadi ruang sosial baru yang membentuk ulang praktik keberagamaan dan relasi otoritas keagamaan. Otoritas tidak lagi dimonopoli oleh institusi formal, melainkan dinegosiasikan melalui interaksi antara pengguna, platform digital, dan algoritma. Dalam konteks ini, legitimasi suatu penafsiran tidak hanya ditentukan oleh kualitas argumentasi ilmiah, tetapi juga oleh tingkat visibilitas konten di ruang digital.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Ula & Muhid (2025) yang menjelaskan bahwa perkembangan *Cyber Islamic Environments* telah menghasilkan pola baru dalam produksi dan distribusi pengetahuan Islam. Internet memungkinkan siapa pun mempublikasikan pandangan keagamaan kepada khalayak luas tanpa harus melalui mekanisme akademik yang ketat. Akibatnya, masyarakat dihadapkan pada beragam otoritas yang saling berkompetisi di ruang digital. Pergeseran ini menunjukkan bahwa otoritas keagamaan mengalami proses desentralisasi (*distributed religious authority*), di mana legitimasi tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada institusi keagamaan tradisional, tetapi juga dipengaruhi oleh jaringan digital dan perilaku pengguna.

Dalam perspektif teori epistemologi tafsir yang digunakan dalam penelitian ini, perubahan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai hilangnya otoritas mufasir. Sebaliknya, yang mengalami transformasi adalah mekanisme masyarakat dalam mengakses dan memverifikasi pengetahuan tafsir. Abdullah Saeed (2006) menegaskan bahwa perkembangan sosial dan teknologi selalu memengaruhi cara umat Islam memahami Al-Qur'an, tetapi perubahan konteks tidak menghapus

pentingnya metodologi sebagai landasan penafsiran. Dengan kata lain, perkembangan media digital memang mengubah pola komunikasi keagamaan, tetapi tidak mengubah prinsip epistemologis yang menjadi dasar validitas tafsir.

Temuan ini menunjukkan bahwa terjadi pergeseran dari *authority by scholarship* menuju *authority by accessibility*. Pada model pertama, legitimasi penafsiran dibangun melalui kompetensi keilmuan, penguasaan metodologi, dan pengakuan komunitas akademik. Sementara itu, pada model kedua, otoritas cenderung dipersepsikan berdasarkan kemudahan memperoleh informasi, kecepatan respons, dan tingginya eksposur digital. Pergeseran tersebut tidak selalu menghasilkan penurunan kualitas pengetahuan, tetapi berpotensi mengubah cara masyarakat menentukan sumber rujukan keagamaan. Dalam situasi demikian, otoritas ilmiah dapat tersisih oleh otoritas algoritmik apabila pengguna lebih mengutamakan efisiensi dibandingkan proses verifikasi terhadap sumber informasi.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa transformasi otoritas tafsir pada era digital bukan disebabkan oleh perubahan substansi ilmu tafsir, melainkan oleh perubahan ekosistem komunikasi pengetahuan. Temuan ini menguatkan bahwa teknologi digital telah membentuk konfigurasi baru otoritas keagamaan. Akan tetapi, penelitian ini memberikan penekanan yang berbeda, yaitu bahwa dalam studi tafsir Al-Qur'an, perubahan tersebut harus dipahami melalui perspektif epistemologi Islam. Dengan demikian, yang bergeser bukanlah sumber legitimasi penafsiran, melainkan cara masyarakat mengakses, memilih, dan mempercayai sumber-sumber pengetahuan tafsir. Oleh karena itu, tantangan utama pada era digital bukan mempertentangkan teknologi dengan tradisi tafsir, melainkan membangun mekanisme yang mampu menjaga otoritas metodologis tafsir di tengah semakin terbukanya akses informasi keagamaan.

Berdasarkan sintesis literatur yang dilakukan, penelitian ini berpendapat bahwa istilah "pergeseran otoritas tafsir" tidak tepat dipahami sebagai perpindahan otoritas dari mufasir kepada teknologi digital. Pergeseran yang sesungguhnya terjadi adalah pergeseran mekanisme legitimasi epistemik (*epistemic legitimacy*). Otoritas tafsir tetap berada pada mufasir yang memenuhi kompetensi keilmuan, sedangkan ruang digital dan teknologi hanya mengubah cara otoritas tersebut

diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan demikian, ekosistem digital lebih tepat dipahami sebagai ruang negosiasi otoritas (*arena of negotiated authority*) daripada sebagai pengganti otoritas keilmuan Islam.

2. Analisis Epistemologi Penafsiran Al-Qur'an pada Era Generative Artificial Intelligence

Pergeseran otoritas tafsir dalam ekosistem digital semakin menguat seiring berkembangnya Generative AI. Berbeda dengan media digital generasi sebelumnya yang berfungsi sebagai penyedia akses terhadap dokumen atau literatur, Generative AI mampu menghasilkan respons baru melalui proses sintesis informasi dari berbagai sumber. Kemampuan tersebut menjadikan AI tidak lagi dipandang sebagai mesin pencari (*search engine*), melainkan sebagai mitra dialog yang mampu menjawab pertanyaan, merangkum berbagai pendapat, bahkan menyusun argumentasi yang menyerupai penjelasan seorang ahli. Dalam konteks studi Al-Qur'an, perubahan ini membuka peluang baru dalam proses pembelajaran, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan epistemologis mengenai posisi AI dalam aktivitas penafsiran.

Secara teknis, Generative AI dibangun di atas *Large Language Models* (LLMs) yang dilatih menggunakan miliaran kata dari berbagai sumber teks. Model ini bekerja dengan memprediksi urutan kata yang paling mungkin muncul berdasarkan pola statistik yang dipelajari selama proses pelatihan (Bommasani et al., 2022). Dengan mekanisme tersebut, AI mampu menghasilkan jawaban yang koheren dan kontekstual, termasuk ketika diminta menjelaskan makna suatu ayat Al-Qur'an atau membandingkan pandangan beberapa mufasir. Namun demikian, kemampuan menghasilkan teks yang meyakinkan tidak berarti bahwa AI memahami makna sebagaimana manusia memahami suatu konsep. Floridi dan Chiriatti (2020) menegaskan bahwa sistem AI tidak memiliki kesadaran (*consciousness*), intensionalitas, maupun kemampuan melakukan penalaran normatif. Jawaban yang dihasilkan merupakan hasil pengolahan pola bahasa, bukan proses ijtihad yang berlandaskan metodologi keilmuan.

Dalam perspektif teori yang digunakan pada penelitian ini, posisi tersebut lebih tepat dipahami melalui konsep *epistemic tool*. Konsep ini memandang AI

sebagai instrumen yang membantu manusia memperoleh, mengelola, dan mengorganisasi pengetahuan tanpa mengambil alih fungsi manusia sebagai pengambil keputusan epistemologis. Dengan demikian, AI berperan memperluas kapasitas intelektual pengguna melalui penyediaan informasi yang cepat dan komprehensif, tetapi tidak memiliki otoritas untuk menentukan kebenaran suatu penafsiran. Analisis ini sejalan dengan pandangan Floridi (2023) yang menyatakan bahwa AI seharusnya diposisikan sebagai teknologi yang meningkatkan kemampuan manusia (*human augmentation*), bukan menggantikannya (*human replacement*).

Dalam kajian tafsir Al-Qur'an, keberadaan Generative AI memberikan sejumlah manfaat yang tidak dapat diabaikan. AI mampu mempercepat penelusuran literatur, membandingkan pendapat berbagai mufasir, mengidentifikasi tema-tema Al-Qur'an, serta membantu peneliti menemukan keterkaitan antarayat dan antarreferensi dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan penelusuran manual. Kemampuan tersebut berpotensi meningkatkan efisiensi penelitian dan memperluas akses masyarakat terhadap khazanah tafsir klasik maupun kontemporer. Temuan Alkaabi et al. (2025) menunjukkan bahwa pemanfaatan Generative AI dalam dunia pendidikan dapat meningkatkan efektivitas proses belajar melalui penyediaan informasi yang adaptif, personal, dan mudah diakses. Dalam konteks studi Islam, potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperluas literasi Al-Qur'an dan mempercepat eksplorasi sumber-sumber keilmuan.

Meskipun demikian, penggunaan AI dalam studi tafsir juga mengandung sejumlah keterbatasan yang harus dipahami secara kritis. Salah satu persoalan utama adalah fenomena AI *hallucination*, yaitu kondisi ketika sistem menghasilkan informasi yang tampak benar secara linguistik tetapi tidak didukung oleh fakta atau sumber yang valid (Kurniawan et al., 2026). Dalam kajian tafsir, fenomena ini dapat muncul dalam bentuk penyebutan ayat yang tidak tepat, atribusi pendapat mufasir yang keliru, atau penyederhanaan argumentasi ilmiah yang kompleks. Risiko tersebut menunjukkan bahwa jawaban AI tidak dapat dijadikan rujukan primer tanpa melalui proses verifikasi terhadap sumber-sumber yang otoritatif.

Selain itu, kualitas jawaban AI sangat dipengaruhi oleh karakteristik data pelatihan yang digunakan. Bender et al. (2021) mengingatkan bahwa model bahasa besar berpotensi mereproduksi bias yang terdapat dalam data pelatihannya. Dalam konteks penafsiran Al-Qur'an, bias tersebut dapat berupa dominasi perspektif tafsir tertentu, kurangnya representasi literatur Islam klasik, atau kecenderungan menyajikan satu pandangan sebagai seolah-olah merupakan konsensus. Akibatnya, pengguna yang tidak memiliki literasi keagamaan yang memadai dapat menerima jawaban AI tanpa menyadari adanya keterbatasan metodologis maupun keragaman pendapat dalam tradisi tafsir.

Analisis ini menunjukkan bahwa keterbatasan Generative AI tidak terletak pada kemampuannya menghasilkan teks, melainkan pada ketidakmampuannya melakukan evaluasi epistemologis terhadap informasi yang dihasilkannya. Seorang mufasir tidak hanya mengumpulkan pendapat ulama, tetapi juga melakukan kritik sanad, analisis kebahasaan, mempertimbangkan konteks historis, serta menggunakan kaidah-kaidah usul tafsir dalam menarik kesimpulan. Seluruh proses tersebut merupakan aktivitas intelektual yang melibatkan pertimbangan normatif dan tanggung jawab ilmiah. Sebaliknya, AI hanya melakukan sintesis terhadap pola-pola informasi yang tersedia dalam data pelatihan tanpa memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan validitas argumentasi yang dihasilkan.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa Generative AI tidak menggeser fungsi mufasir sebagai pemegang otoritas epistemologis, tetapi mengubah cara proses pengetahuan berlangsung. Jika sebelumnya AI dipahami hanya sebagai alat pencarian informasi, kini AI berperan sebagai fasilitator yang mempercepat eksplorasi literatur dan penyusunan informasi. Oleh karena itu, penggunaan AI dalam studi tafsir lebih tepat ditempatkan pada tahap eksplorasi, komparasi, dan organisasi pengetahuan, sedangkan proses analisis, ijtihad, dan penetapan kesimpulan tetap menjadi tanggung jawab manusia yang memiliki kompetensi dalam ilmu tafsir.

Temuan tersebut memperkuat paradigma *Human-Centered Artificial Intelligence* yang menempatkan manusia sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan. Rekomendasi UNESCO (2021) mengenai etika *Artificial Intelligence* juga

menegaskan bahwa sistem AI harus dikembangkan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan manusia (*human oversight*). Dalam konteks penelitian ini, prinsip tersebut mengandung implikasi bahwa pemanfaatan Generative AI dalam penafsiran Al-Qur'an harus selalu disertai dengan proses verifikasi terhadap sumber primer, dialog dengan literatur tafsir yang otoritatif, serta evaluasi metodologis oleh ahli yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu tafsir.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa posisi *Generative Artificial Intelligence* dalam studi tafsir tidak dapat dipahami sebagai otoritas epistemik, melainkan sebagai instrumen epistemik (*epistemic tool*). AI berfungsi memperluas akses terhadap pengetahuan dan meningkatkan efisiensi proses penelitian, tetapi tidak memiliki legitimasi metodologis untuk menggantikan peran mufasir. Dengan demikian, tantangan utama bukanlah membatasi penggunaan AI dalam kajian Al-Qur'an, melainkan membangun mekanisme yang mampu memastikan bahwa setiap informasi yang dihasilkan AI tetap diverifikasi melalui prinsip-prinsip epistemologi tafsir.

3. Rekonstruksi Otoritas Tafsir melalui *Human-Centered Digital Tafsir Framework* (HCDTF)

Analisis pada subbab sebelumnya menunjukkan bahwa perkembangan *Generative Artificial Intelligence* telah mengubah cara masyarakat mengakses, memproduksi, dan mendistribusikan pengetahuan tafsir. Akan tetapi, perubahan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai perpindahan otoritas penafsiran dari manusia kepada teknologi. Yang mengalami transformasi adalah mekanisme memperoleh dan memverifikasi pengetahuan keagamaan dalam ruang digital. Oleh karena itu, tantangan utama pada era AI bukanlah menolak penggunaan teknologi, melainkan membangun kerangka epistemologis yang mampu mengintegrasikan perkembangan teknologi dengan prinsip-prinsip metodologi tafsir yang telah berkembang dalam tradisi keilmuan Islam.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa kelemahan utama dalam penggunaan AI bukan terletak pada kemampuan sistem menghasilkan informasi, tetapi pada absennya mekanisme pertanggungjawaban epistemologis. Sebagaimana

dijelaskan Floridi (2023), AI merupakan teknologi yang mampu memperluas kapasitas kognitif manusia (*cognitive augmentation*), tetapi tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian normatif (*normative judgement*). Dalam studi tafsir, penilaian normatif merupakan inti dari proses ijtihad karena melibatkan evaluasi terhadap kualitas dalil, konteks historis, kaidah bahasa, maqāṣid al-syarī'ah, serta berbagai perangkat metodologis lainnya. Dengan demikian, hasil yang dihasilkan AI tidak dapat diposisikan sebagai produk tafsir, melainkan sebagai hasil sintesis informasi yang tetap memerlukan verifikasi ilmiah.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menawarkan *Human-Centered Digital Tafsir Framework* (HCDTF) sebagai model konseptual yang menempatkan manusia sebagai pusat otoritas epistemologis dalam pemanfaatan AI untuk studi Al-Qur'an. Model ini dikembangkan melalui sintesis antara epistemologi tafsir klasik, teori *digital religion*, konsep *epistemic tool*, dan paradigma *Human-Centered Artificial Intelligence*. Keempat perspektif tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi seharusnya memperkuat kapasitas intelektual mufasir, bukan menggantikannya.

Dalam kerangka HCDTF, proses penafsiran dibangun melalui lima komponen utama yang saling berkaitan.

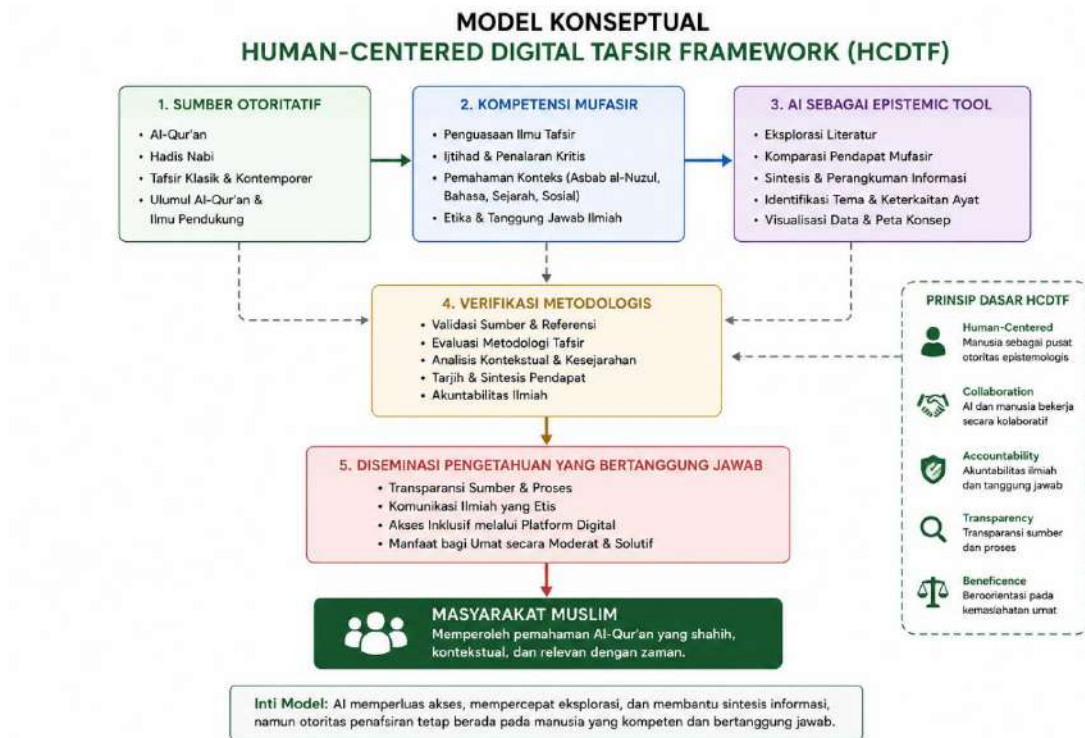
Pertama, sumber otoritatif (*authoritative sources*). Seluruh proses penafsiran harus tetap berpijak pada Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, serta disiplin ilmu pendukung seperti ulumul Al-Qur'an, ilmu hadis, usul fikih, dan linguistik Arab. *Artificial Intelligence* tidak menciptakan sumber pengetahuan baru, tetapi hanya memfasilitasi akses terhadap sumber-sumber tersebut. Oleh karena itu, legitimasi epistemologis tetap berasal dari khazanah keilmuan Islam, bukan dari sistem AI itu sendiri.

Kedua, kompetensi mufasir (*human scholarly competence*). Penelitian ini menegaskan bahwa kecerdasan buatan tidak dapat menggantikan kapasitas intelektual seorang mufasir. Kemampuan melakukan *tarjih*, memahami konteks turunnya ayat, mengidentifikasi perbedaan pendapat ulama, serta mempertimbangkan implikasi sosial suatu penafsiran merupakan aktivitas ilmiah yang membutuhkan pengalaman, pengetahuan, dan tanggung jawab akademik.

Artificial Intelligence dapat membantu menyediakan informasi, tetapi keputusan interpretatif tetap berada pada manusia yang memiliki kompetensi metodologis.

Ketiga, Artificial Intelligence sebagai epistemic tool. Pada tahap ini, AI dimanfaatkan untuk mempercepat penelusuran literatur, melakukan komparasi berbagai pandangan mufasir, mengidentifikasi tema-tema Al-Qur'an, membantu proses sintesis informasi, serta mendukung eksplorasi awal terhadap suatu persoalan. Fungsi tersebut sejalan dengan paradigma *Human-Centered AI* yang memandang teknologi sebagai instrumen pendukung pengambilan keputusan, bukan pengambil keputusan itu sendiri (Unesco, 2021). *Keempat, verifikasi metodologis (methodological verification).* Seluruh informasi yang dihasilkan *Artificial Intelligence* harus melalui proses evaluasi berdasarkan metodologi ilmu tafsir. Tahapan ini meliputi pemeriksaan validitas ayat yang dikutip, ketepatan penggunaan hadis, kesesuaian dengan kaidah tafsir, analisis terhadap keberagaman pendapat ulama, serta penilaian terhadap konteks historis dan sosial ayat. Proses verifikasi inilah yang membedakan penggunaan AI dalam penelitian ilmiah dengan penggunaan AI sebagai penyedia informasi umum. *Kelima, diseminasi pengetahuan yang bertanggung jawab (responsible knowledge dissemination).* Hasil penafsiran yang telah melalui proses verifikasi selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat melalui berbagai platform digital dengan tetap menjaga transparansi sumber, akuntabilitas akademik, serta etika komunikasi ilmiah. Pada tahap ini, teknologi digital berfungsi memperluas jangkauan penyebaran pengetahuan tanpa menghilangkan tanggung jawab ilmiah mufasir terhadap isi penafsirannya.

Gambar 1.



Berdasarkan lima komponen tersebut, penelitian ini mengusulkan bahwa hubungan antara manusia dan *Artificial Intelligence* dalam studi tafsir bersifat kolaboratif, bukan substitutif. *Artificial Intelligence* mempercepat proses eksplorasi informasi, sedangkan manusia mempertahankan fungsi analisis, evaluasi, dan penetapan makna. Dengan demikian, relasi keduanya membentuk sistem *human-in-the-loop*, yaitu model pemanfaatan AI yang selalu menempatkan manusia sebagai pengendali akhir dalam setiap proses pengambilan keputusan epistemologis. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *human oversight* yang direkomendasikan UNESCO (2021) sebagai salah satu prinsip dasar etika *Artificial Intelligence*.

Temuan penelitian ini memperluas konsep *distributed religious authority* yang dikemukakan Campbell (2013) dan Bunt (2018). Jika penelitian terdahulu menjelaskan bahwa ruang digital menyebabkan otoritas keagamaan menjadi lebih terdistribusi melalui jaringan media dan pengguna, maka penelitian ini menunjukkan bahwa pada konteks studi tafsir Al-Qur'an distribusi tersebut harus dibatasi oleh mekanisme verifikasi epistemologis. Dengan kata lain, distribusi akses

terhadap pengetahuan tidak boleh dimaknai sebagai distribusi legitimasi penafsiran. Legitimasi tetap melekat pada proses ilmiah yang mengikuti metodologi tafsir, sedangkan teknologi hanya berfungsi sebagai media yang mempercepat proses tersebut.

Kontribusi utama penelitian ini adalah menawarkan perspektif baru bahwa pergeseran otoritas tafsir pada era *Generative Artificial Intelligence* bukan merupakan pergeseran otoritas keilmuan, melainkan pergeseran arsitektur epistemik (*epistemic architecture*). Otoritas ilmiah tetap berada pada manusia yang memiliki kompetensi dalam ilmu tafsir, sedangkan Artificial Intelligence berfungsi sebagai infrastruktur digital yang mendukung proses pencarian, pengorganisasian, dan sintesis informasi. Dengan demikian, tantangan masa depan studi tafsir bukan memilih antara manusia atau teknologi, melainkan membangun ekosistem kolaboratif yang memadukan kekuatan metodologi tafsir dengan kemampuan komputasional *Artificial Intelligence* secara bertanggung jawab.

D. Conclusion

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital, khususnya *Generative Artificial Intelligence* (AI), telah mengubah mekanisme produksi, distribusi, dan akses terhadap pengetahuan tafsir Al-Qur'an. Pergeseran yang terjadi tidak mengubah sumber otoritas tafsir yang tetap berlandaskan Al-Qur'an, Sunnah, dan metodologi ilmu tafsir, tetapi memengaruhi cara masyarakat memperoleh serta memvalidasi informasi keagamaan di ruang digital. Dalam konteks ini, AI berperan sebagai mediator pengetahuan yang mempercepat akses terhadap berbagai sumber tafsir, bukan sebagai pengganti otoritas ilmiah seorang mufasir.

Penelitian ini menawarkan *Human-Centered Digital Tafsir Framework* (HCDTF) sebagai kerangka konseptual yang menempatkan AI sebagai epistemic tool dalam proses penafsiran Al-Qur'an. Melalui model ini, pemanfaatan AI diposisikan sebagai instrumen pendukung yang harus tetap berada dalam koridor metodologi tafsir, verifikasi akademik, dan tanggung jawab etis. Dengan demikian, integrasi antara tradisi keilmuan Islam dan inovasi teknologi menjadi prasyarat penting

untuk menjaga validitas penafsiran sekaligus menjawab tantangan studi tafsir di era digital.

E. References

- A. Campbell, H. (2013). *Digital Religion Understanding Religious Practice in New Media Worlds*.
- Alkaabi, A., Abdallah, A., Alblooshi, S., Alomari, F., & Alneaimi, S. (2025). ChatGPT in higher education: Opportunities, challenges, and required competencies in the absence of guiding policies. *Journal of Education and E-Learning Research*, 12(2), 153–164. <https://doi.org/10.20448/jeelr.v12i2.6746>
- As-Suyuthi, J. (n.d.). *Al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an*.
- Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big? In *FAccT 2021 - Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency* (Vol. 1, Issue 1). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3442188.3445922>
- Bommasani, R., Hudson, D. A., Adeli, E., Altman, R., Arora, S., von Arx, S., Bernstein, M. S., Bohg, J., Bosselut, A., Brunskill, E., Brynjolfsson, E., Buch, S., Card, D., Castellon, R., Chatterji, N., Chen, A., Creel, K., Davis, J. Q., Demszky, D., ... Liang, P. (2022). *On the Opportunities and Risks of Foundation Models*. 1–211. <http://arxiv.org/abs/2108.07258>
- Faria, M., Nurhalimah, U., Kadafi, M., & Khoiri, A. (2026). Dakwah Islam di Era Digital: Peluang, Tantangan dan Strategi Pemanfaatan Media Sosial. *Millatuna Jurnal Studi Islam*, 03(01), 123–133. <https://doi.org/10.33752/mjsi.v3i01.11256>
- Floridi, L., & Chiriatti, M. (2020). GPT-3: Its Nature, Scope, Limits, and Consequences. *Minds and Machines*, 30(4), 681–694. <https://doi.org/10.1007/s11023-020-09548-1>
- Fui-Hoon Nah, F., Zheng, R., Cai, J., Siau, K., & Chen, L. (2023). Generative AI and ChatGPT: Applications, challenges, and AI-human collaboration. *Journal of Information Technology Case and Application Research*, 25(3), 277–304.

<https://doi.org/10.1080/15228053.2023.2233814>

- Kurniawan, F. K., Zakhria, A. K., & Semesta, I. R. L. (2026). Observasi Tingkat Halusinasi pada Model AI Deepseek dalam Menjawab Pertanyaan dengan Ambiguitas Faktual. *Etika Teknologi Informasi*, 2(1).
- Mcclure, P. K. (2019). Hashtag Islam: How Cyber-Islamic Environments Are Transforming Religious Authority, by GARY R. BUNT. *Sociology of Religion*, 80(4), 542–543. <https://doi.org/10.1093/socrel/srz028>
- Said, A. (2006). *Interpreting the Qur'an*.
- Thapa, S., Shiwakoti, S., Shah, S. B., Adhikari, S., Veeramani, H., Nasim, M., & Naseem, U. (2025). Large language models (LLM) in computational social science: prospects, current state, and challenges. *Social Network Analysis and Mining*, 15(1), 1–30. <https://doi.org/10.1007/s13278-025-01428-9>
- Ula, S. N., & Muhid, A. (2025). Transformasi Dakwah Digital Melalui Kecerdasan Buatan: Sebuah Kajian Literatur. *Inteleksia: Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 7(2), 217–236.
- Unesco. (2021). Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence (2021). *International Organization Initiatives*, November, 203–214. <https://doi.org/10.1093/9780197803325.003.0020>

DOI, Copyright,
and License

DOI: XXXX-XXXX

Copyright (c) 2026 author (s) Abdullah Munir¹, Hurin'in AM²

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License



How to cite

All citations and references must follow the APA 7th Edition guidelines